

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
OPD KECAMATAN BADAU
KABUPATEN BELITUNG**



TAHUN 2024

1.1. Latar Belakang

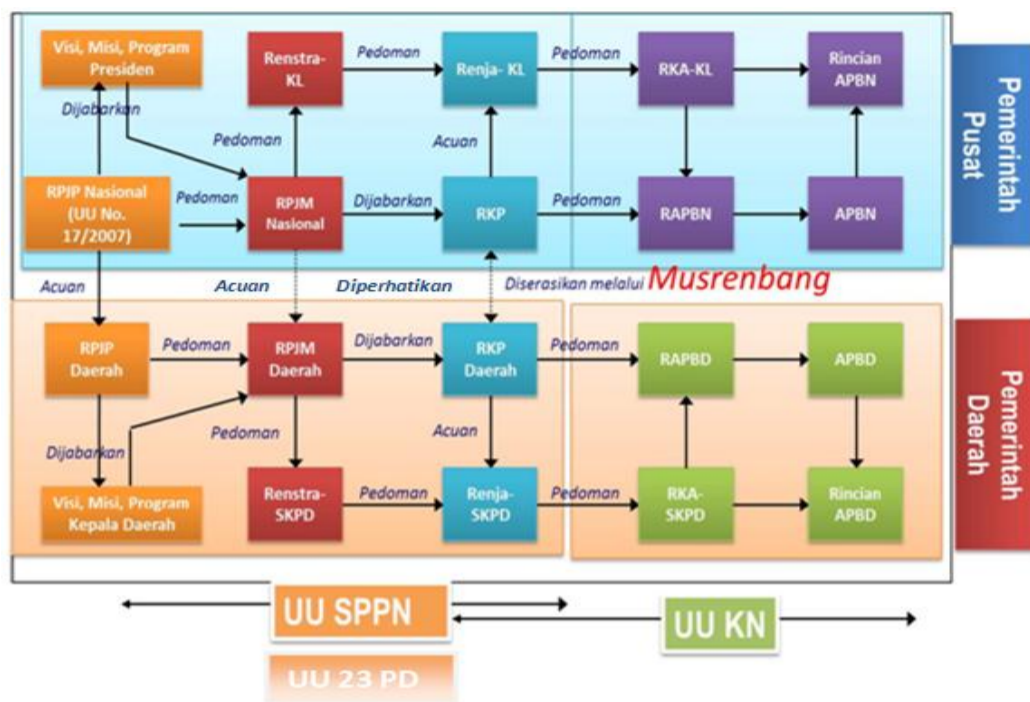
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan tata cara dalam Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1) Tahapan perumusan rancangan Renja OPD dan 2) Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses Penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah Kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan Evaluasi menjadi Optimal dalam upaya akselerasi program Pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023;
 19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023;
 20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan



organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kecamatan Badau Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Kecamatan Badau Tahun 2024 – 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Badau Kabupaten Belitung ini adalah untuk:

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2024.
2. Sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan.
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) Tentang Rencana Pembangunan Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Renja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra Perangkat Daerah) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari tahapan pencapaian RPD 2024-2026. Pada tahun 2024 proses penyusunan Perubahan rencana kerja telah mengacu kepada RPD Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Badau Tahun 2024 Merupakan Penjabaran Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun ke 1. Pencapaian pada tahun (n-3) merupakan Pencapaian RPD Periode sebelumnya yaitu Renstra (tahun 2018 – 2023) berikut pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Kecamatan Badau Kabupaten Belitung

TERLAMPIR



Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2023 pada program ini terdapat 7 (Tujuh) kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat realisasi keuangan 98,76% dan fisik 100%

Sedangkan dari Capaian Rencana Strategis telah memenuhi sesuai dengan kerangka pencapaiannya

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2023 pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat realisasi keuangan 93,56% dan fisik 100%.

➤ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2023 pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat realisasi keuangan 95,65% fisik 100%.



➤ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2023 pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dari kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat realisasi keuangan 79,67% dan fisik 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Badau adalah melaksanakan fungsi sebagai Pelayanan kepada masyarakat, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Perbup No. 63 Tahun 2016. Kecamatan Badau mempunyai tugas pokok melaksanakan Upaya peningkatan Kualitas pelayanan dan mewujudkan Masyarakat maju, mandiri dan sejahtera dengan memfasilitasi pengoptimalan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Badau telah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Badau Tahun 2024 – 2026.

Kinerja pelayanan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung berdasarkan sasaran Renstra PD periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelancaran operasional kantor

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Badau tetap membutuhkan dukungan operasional kantor yang terus dipenuhi setiap tahunnya secara rutin. Kebutuhan operasional tersebut meliputi:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang cetakan, penggandaan, dan Spanduk.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan
- Penyediaan Makanan dan minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daderah.
- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.
- Kesejahteraan Pegawai non PNS



Dalam rangka peningkatan pelayanan aparatur, Kecamatan Badau telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 12 (dua belas) macam yang terdiri dari:

- 4 SOP pada Seksi Pemerintahan
- 4 SOP pada Seksi Ekonomi Pembangunan
- 4 SOP pada Seksi Trantibum dan Pelayanan

2. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi untuk mendukung kinerja pelayanan di Kecamatan Badau adalah sebagai berikut:

- Gedung kantor, pagar, tempat parkir dan penataan halaman kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pengadaan peralatan, Mebeleur dan perlengkapan kantor

3. Penyusunan dokumen laporan kinerja dan keuangan PD

- o LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- o LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), yaitu Laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui PD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- o LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), merupakan Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan namun tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Dalam hal ini PD menyampaikan bahan laporan sesuai dengan urusannya;
- o Laporan Keuangan PD, yaitu produk akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh PD dan kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



4. Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur

Dalam rangka upaya peningkatan disiplin aparatur, Kecamatan Badau melaksanakan upaya-upaya dengan penyediaan sarana pendukung sebagai berikut:

1. Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Penyediaan Pakaian Khusus hari tertentu

5. Meningkatnya kualitas koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pemerintahan, kesejahteraan sosial, ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Badau melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi yang meliputi:

- Pembinaan Keagamaan.
- Promosi potensi daerah
- Pembinaan Perangkat Desa
- Evaluasi perkembangan desa
- Pembinaan nilai-nilai kebangsaan
- Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Seleksi / Pemilihan Bujang Dayang /Duta tk Kecamatan
- Pembinaan Pemuda
- Musrenbang
- Pembinaan dan Evaluasi UKS tingkat Kecamatan

Sedangkan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Badau sampai dengan tahun 2023 didasarkan pada indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Badau Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

No	Uraian IKU	Target 2023	Realisasi	Keterangan
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.70	3.72	
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa	75%	100%	
3.	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	



Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Badau

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	7	8	9	10		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			3.50	3.65	3.77	3.70	3.76	3.69	3.72	
	Persentase Peningkatan Prestasi Kecamatan			85%							
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa				70%	77%	75%		75%	100%	
	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrenbangcam dapat disetujui di Tingkat Kabupaten.				3%	4%			52,26%		
	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku.				100%	100%	100%		100%	100%	



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Badau tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Badau.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel di bawah ini mengungkapkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal Kecamatan Badau dengan pendekatan SWOT.



Tabel 2.4.
Analisis SWOT identifikasi faktor internal dan eksternal
Kecamatan Badau Kabupaten Belitung

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan ▪ Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas ▪ Adanya komitmen pimpinan dalam penataan manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik ▪ Suasana kerja yang kondusif ▪ Adanya pembagian tugas yang jelas yang dituangkan dalam tugas dan fungsi ▪ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dana, sarana dan prasarana ▪ Jumlah pegawai yang belum memadai ▪ Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi ▪ Belum terpenuhinya SDM yang berkompotensi dan bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya UU Desa No: 6 Tahun 2014 dan PP No :34 Tahun 2014 • Adanya Forum APDESI • Adanya Integrasi Program antar SKPD • Tersedianya SDM sebagai Narasumber • Tersedianya dana, sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja perangkat Desa dan profesionalisme perangkat Desa • Masih adanya ego sektoral Perangkat Desa • Adanya interpretasi yang berbeda terhadap aturan-aturan Pemerintahan Desa • Adanya tuntutan Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Penatausahaan Keuangan, Kepegawaian, Kependudukan, melalui penerapan Teknologi Informasi sudah mulai terbangun, begitu pula dengan Sistem SIMDA. ▪ Adanya skala prioritas dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya jaringan komputer dan internet (LAN) yang memadai ▪ Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll) ▪ Rencana pengembangan jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapan Perangkat Desa dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja Perangkat desa ▪ Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat dinamis ▪ Tuntutan Masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN (belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur);

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD, yaitu proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan kebutuhan untuk mencapai program yang tidak tercapai target kinerja pada tahun sebelumnya atau melebihi target.

Berikut tabel hasil rancangan akhir RKPD tahun 2024 adalah yaitu:



Tabel. 2.5.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kabupaten Belitung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Badau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Induk Tahun 2024				Catatan Penting	Perubahan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Urusan : Pemerintahan								
7	Bidang Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya								
7	01	1. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Dokumen Peencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Badau	100 %	2.433.358.600	APBD	100 %	2.904.009.257
			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		75,44 %			75,44 %	
			3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100 %			100 %	
			4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			100 %	
7	01	1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Badau	10 Dokumen	10.000.000	APBD	10 Dokumen	10.000.000
			Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Peraturan		100 %			100 %	
7	01	1.01	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badau	3 Dokumen	3.000.000	APBD	3 Dokumen	3.000.000
7	01	1.01	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badau	1 Dokumen	1.000.000	APBD	1 Dokumen	1.000.000
7	01	1.01	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badau	1 Dokumen	1.000.000	APBD	1 Dokumen	1.000.000
7	01	1.01	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badau	1 Dokumen	1.000.000	APBD	1 Dokumen	1.000.000
7	01	1.01	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badau	1 Dokumen	1.000.000	APBD	1 Dokumen	1.000.000
7	01	1.01	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badau	3 Laporan	3.000.000	APBD	3 Laporan	3.000.000
7	01	1.02	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badau	3 Dokumen	1.811.422.210	APBD	3 Dokumen	2.064.953.767
			Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan		100 %			100 %	
7	01	1.02	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badau	12 Orang/Bulan	1.809.422.210	APBD	13 Orang/Bulan	2.062.953.767
7	01	1.02	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badau	2 Dokumen	2.000.000	APBD	2 Dokumen	2.000.000



7	01	01	1.03		3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Hasil : Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Badau	100 % 100 %	-	APBD		100 % 100 %	150.000.000
7	01	01	1.03	01	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badau	0 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	150.000.000
7	01	01	1.05		4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Badau	12 orang 75 %	41.000.000	APBD		13 orang 75,44 %	42.215.000
7	01	01	1.05	02	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badau	2 Paket	6.000.000	APBD		1 Paket	7.215.000
7	01	01	1.05	09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badau	3 Orang	35.000.000	APBD		3 Orang	35.000.000
7	01	01	1.06		5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Badau	100 % 100 %	203.665.390	APBD		100 % 100 %	240.681.390
7	01	01	1.06	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Badau	1 Paket	1.500.000	APBD		1 Paket	1.500.000
7	01	01	1.06	02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Badau	2 Paket	17.252.450	APBD		2 Paket	17.252.450
7	01	01	1.06	03	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Badau	1 Paket	7.000.000	APBD		1 Paket	7.000.000
7	01	01	1.06	04	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	Badau	2 Paket	84.544.440	APBD		2 Paket	101.560.440
7	01	01	1.06	05	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Badau	1 Paket	10.368.500	APBD		1 Paket	10.368.500
7	01	01	1.06	06	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Badau	1 Dokumen	3.000.000	APBD		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	1.06	09	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badau	12 Laporan	80.000.000	APBD		12 Laporan	100.000.000
7	01	01	1.07		6 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badau	7 Jenis 100 %	66.600.000	APBD		7 Jenis 100 %	90.400.000
7	01	01	1.07	01	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badau	1 Unit	46.620.000	APBD		1 Unit	40.400.000
7	01	01	1.07	02	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Badau	0 Unit	-	APBD		0 Unit	-
7	01	01	1.07	05	3. Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Badau	0 Unit	-	APBD		0 Unit	-
7	01	01	1.07	06	4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Badau	2 Unit	19.980.000	APBD		8 Unit	50.000.000



7	01	01	1.08		7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Badau	100 % 100 %	217.569.200	APBD		100 % 100 %	222.657.300
7	01	01	1.08	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badau	12 Laporan	500.000	APBD		12 Laporan	500.000
7	01	01	1.08	02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Badau	12 Laporan	18.000.000	APBD		12 Laporan	23.000.000
7	01	01	1.08	04	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Badau	12 Laporan	199.069.200	APBD		12 Laporan	199.157.300
7	01	01	1.09		8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badau	7 Jenis 100 %	83.101.800	APBD		7 Jenis 100 %	83.101.800
7	01	01	1.09	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Badau	11 Unit	45.000.000	APBD		11 Unit	45.000.000
7	01	01	1.09	06	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badau	32 Unit	24.814.800	APBD		32 Unit	24.814.800
7	01	01	1.09	09	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Badau	1 Unit	13.287.000	APBD		1 Unit	13.287.000
7	01	01	1.09	10	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Badau	Unit	-	APBD		Unit	
7					Urusan : Unsur Kewilayahan								
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan								
7	01	03			2 Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100 %	132.736.300	APBD		100 %	132.736.300
7	01	03	2.01		1. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran : Dokumen Hasil Musrenbang Jumlah Pemberdayaan Desa Hasil : Pemberdayaan Desa Terkoordinasi dengan Baik	Badau	1 Dokumen 3 Pemberdayaan 100 %	132.736.300	APBD		1 Dokumen 3 Pemberdayaan 100 %	132.736.300
7	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Badau	7 Lembaga	22.869.350	APBD		7 Lembaga	22.869.350
7	01	03	2.01	03	2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Badau	1 Laporan	109.866.950	APBD		1 Laporan	109.866.950



7	01	05				3 Program : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Badau	100 %	371.234.900	APBD		100 %	371.234.900
7	01	05	2.01			1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran : Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Hasil : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Badau	1 Dokumen 100 %	371.234.900	APBD		1 Dokumen 100 %	371.234.900
7	01	05	2.01	03		Sub Kegiatan 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Badau	100 Orang	223.815.900	APBD		70 Orang	223.815.900
7	01	05	2.01	04		2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Badau	50 Orang	147.419.000	APBD		75 Orang	147.419.000
7	01	06				4 Program : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Administrasi	Badau	100 %	74.613.200	APBD		100 %	74.613.200
7	01	06	2.01			1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Laporan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil : Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggara Dengan Baik	Badau	4 Dokumen 100 %	74.613.200	APBD		3 Dokumen 100 %	74.613.200
7	01	06	2.01	02		Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Badau	1 Dokumen	38.753.200	APBD		1 Dokumen	38.753.200
7	01	06	2.01	06		2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Badau	0 Dokumen		APBD		0 Dokumen	
7	01	06	2.01	09		3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Badau	2 Dokumen	35.860.000	APBD		2 Dokumen	35.860.000
JUMLAH										3.011.943.000				3.482.593.657



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari perangkat daerah kabupaten dikumpulkan berdasarkan hasil - hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan Kabupaten.

Berikut adalah daftar usulan kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat :

Tabel 2.6.

Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Perangkat Daerah: Kecamatan Badau

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Merupakan Pedoman dalam mewujudkan Perencanaan yang Konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan setiap tahun anggaran dan juga memberikan gambaran kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan instropeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan instansi, juga memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah serta Indikator atau ukuran keberhasilan/Kegagalan pada tahun 2024.

Selanjutnya memberikan arah kebijakan bagi Kecamatan Badau maupun bagi dinas/Instansi terkait dalam menyusun Kebijakan, Program, Anggaran dan Pembangunannya.

Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Badau bahwa untuk mencapai Tujuan Nasional perlu adanya Penguatan dibidang Pelayanan Publik yang berkualitas dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta Prestasi Pelayanan Publik di Kecamatan yang bermutu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari RPD Perangkat Daerah Kecamatan Badau Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai dalam pada tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra. Perumusan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah Sebagai berikut :

Tujuan Renja Kecamatan Badau dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas di Kecamatan Badau.

Sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Badau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Prestasi Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Badau Tahun 2024 ada beberapa:

- a. **Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan/pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :**
- b. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
- c. Pencapaian SDGs,
- d. Pengentasan Kemiskinan,
- e. Pencapaian NSPK dan SPM,
- f. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- g. Pengembangan daerah terisolir,
- h. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan
- i. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- j. meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan infrastruktur dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Belitung tahun 2024-2026
- k. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- l. Ketersediaan aparatur perencana yang mempunyai kompetensi yang memadai

- m. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Badau Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 Yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produkti dengan memanfaatkan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat

Dan mewujudkan Misi :

Misi Kesatu	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.
Misi Kedua	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel, transparan.
Misi Ketiga	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang ekonomi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Mendukung Pencapaian KEK.
3. Mendukung KSPN.
4. Mendukung KPPN.

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ini, Perangkat Daerah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung merencanakan 4 (Empat) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 3.011.943.000- (Tiga Milyar Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan lokasi kegiatan sebagai berikut: Di Kecamatan Badau. Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Belitung murni Rp. 3.011.943.000- Dana Alokasi Khusus Dan Dana Daba

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 Sebagai Berikut :

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Badau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Badau Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD dalam

kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung serta penyusunan perencanaan anggaran.

- Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai mana tabel 3.1

Tabel 3.1.
Nama Program dan Jumlah Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah anggaran
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5 Kegiatan	31 Sub Kegiatan	2.904.009.257
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	132.736.300
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	371.234.900
4	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	74.613.200
JUMLAH				3.482.593.657

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Badau Tahun 2024 secara total sebesar **Rp. 3.482.593.657** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Belitung.

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Badau Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 Kabupaten Belitung Kecamatan Badau.

Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.1

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan Dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Badau Tahun 2024 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kecamatan Badau tahun 2024. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Badau Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Badau dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Badau tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Kecamatan Badau dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Badau, 26 September 2024

CAMAT BADAU,



AZHARI, S.IP, M.Si

NIP. 198806262007011001